

Sikap politik mahasiswa UNJ terhadap undang-undang ibukota negara tahun 2022

Iqbal Syafrudin ^{a,1*}, Mohammad Maiwan ^{b,2}, Raharjo ^{c,3}, Fajar Sae ^{d,4}

^{a,b,c,d}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta

¹Iqbalsyafrudin89@gmail.com, ²maiwan@unj.ac.id, ³raharjo@unj.ac.id

*Korespondensi Penulis

Informasi artikel	ABSTRAK
Diterima: 28-10-2022 Disetujui: 22-11-2022 Kata kunci: Mahasiswa Ibukota UU IKN Pemindahan	Tujuan penelitian ini guna untuk meneliti dan mendeskripsikan sikap mahasiswa terhadap pemindahan ibukota Negara serta Undang-undang ibukota Negara (IKN) tahun 2022, pada penelitian ini sikap mahasiswa diwakili oleh para ketua badan eksekutif mahasiswa (BEM) fakultas yang berjumlah 8 orang sebagai elite politik yang merupakan representasi sikap mahasiswa dari masing-masing fakultasnya. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan campuran antara kuantitatif dan kualitatif yang mana untuk lebih memahami masalah penelitian dengan mengonvergensi (atau mentriangulasi) data kuantitatif yang berupa angka-angka dan data kualitatif yang berupa rincian-rincian deskriptif. Hasil dari penelitian ini ialah 75% atau 6 orang dari 8 orang ketua BEM fakultas setuju terhadap kebijakan pemindahan ibukota. Sedangkan, 60% atau 5 orang ketua BEM fakultas menerima Undang-undang (UU) IKN. Alasan 6 orang ketua BEM setuju pemindahan ibukota karena Jakarta dirasa sudah terlalu padat serta alasan 5 orang ketua BEM menerima UU IKN karena dirasa pemindahan ibukota memerlukan konstitusi yang jelas. Kesimpulan pada penelitian ini ialah Mahasiswa yang diwakili para ketua BEM mayoritas setuju dengan kebijakan pemindahan ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur serta menerima UU IKN sebagai konstitusi yang menjadi landasan pemindahan ibukota dengan memberikan saran perbaikan terhadap perencanaan pemindahan ibukota serta isi dari UU IKN.
Received: 28-10-2022 Accepted: 22-11-2022 Keywords:	ABSTRACT The purpose of this study is to examine and describe student attitudes towards the relocation of the state capital and the 2022 state capital law (IKN), in this study, student attitudes were represented by the heads of the student executive board (BEM) of the faculty, which amounted to 8 people as political elites who represents the attitude of students from each faculty. The approach used in this research is a mixed approach between quantitative and qualitative which is to better understand the research problem by convergence (or triangulate) quantitative data in the form of numbers and qualitative data in the form of descriptive details. The results of this study are 75% or 6 of the 8 chairpersons of the faculty BEM agree to the policy of moving the capital. Meanwhile, 60% or 5 chairpersons of the faculty BEM received the IKN Law (UU). The reason the 6 BEM heads agreed to move the capital was because Jakarta was deemed too crowded and the 5 BEM chairmen accepted the IKN Law because they felt that moving the capital required a clear constitution. The conclusion of this study is that the students represented by the chairpersons of the BEM majority agreed with the policy of moving the state capital from Jakarta to East Kalimantan and accepted the IKN Law as the constitution which became the basis for the relocation of the capital by providing suggestions for improvements to the planning for the relocation of the capital and the contents of the IKN Law.

Copyright © 2022 Iqbal Syafrudin, Mohammad Maiwan, Raharjo, Fajar Sae. All Right Reserved

How to Cite: Demokrasi, J. I. M. (2022). Sikap politik mahasiswa UNJ terhadap Undang-undang Ibukota Negara tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 22(1), 157-160. DOI: 10.21009/jimd.v22i1.30391



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019 dan pada konferensi pers di Istana Negara pada tanggal 26 Agustus 2019 untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN). Menurut Presiden Jokowi banyak faktor menjadi pertimbangan perlunya dilakukan pemindahan IKN yaitu Faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, politik, lokasi IKN, serta pertahanan dan keamanan, bahkan sampai dengan potensi bencana alam menjadi pertimbangan pentingnya IKN untuk pindah. Kepadatan penduduk yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa telah berdampak pada kesenjangan dalam berbagai aspek dan stagnasi ekonomi yang tidak kunjung dapat diperbaiki menjadi salah satu pertimbangan Presiden untuk memindahkan IKN.

Dalam pengertian yang umum elit menunjuk pada sekelompok orang yang ada dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan. Dalam pengertian sosiologis dan politis, elite adalah the ruling class, suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat memengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbal balik. Dari sini bisa dikatakan Mahasiswa sebagai elite karna mendapatkan kedudukan penting di masyarakat sebagai agen perubahan yang selalu hadir ditengah masalah yang dihadapi masyarakat dengan kebijakan yang dibuat negara. (Anshoriy, 2008)

Pada saat ini terdapat beberapa penelitian terkait sikap politik telah dilakukan oleh beberapa orang. Abdul Reza dan Sedigheh Shakib (2019) penelitiannya bagus dalam hal topik penelitian karena membahas keterkaitan situs jaringan sosial (SnSs) terhadap pengetahuan serta sikap politik para pelajar atau mahasiswa. Akan tetapi kurang dibahas mengapa ada keterkaitan jejaring sosial dengan pengetahuan politik, dan pengetahuan politik apa yang dibahas di penelitian ini.

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Qur'anul Kariem dan Dwian Hartomi (2019) melakukan penelitian dengan

topic sikap politik DPRD terhadap wacana kepemimpinan keratin Yogyakarta. Penelitian ini bagus karena meneliti sikap politik anggota DPRD terhadap keratin, yang bisa dibilang sikap politik legislatif kepada eksekutif. Akan tetapi penelitian ini hanya menunjukkan sikap negatif yang dituturkan oleh anggota DPRD saja tanpa membahas hal positif dalam wacana kepemimpinan.

Penelitian terdahulu yang beredar diberbagai platform sangat jarang sekali membahas mengenai sikap politik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah terlebih kebijakan pemindahan ibukota Negara yang memang menjadi kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Permasalahan yang ada mahasiswa memiliki peran menyuarakan aspirasi rakyat yang tidak tersampaikan terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan tetapi sangat jarang diteliti tentang sikap politik dari mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk meneliti sikap mahasiswa terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama terkait pemindahan ibukota Negara.

Maka berdasarkan latarbelakang diatas sangat menarik bagi peneliti untuk meneliti mengenai respon mahasiswa Universitas Negeri Jakarta terhadap Undang-undang Ibu Kota Negara tahun 2022 yang sudah disahkan terlebih para mahasiswa yang memegang predikat sebagai elite massa dan memiliki kelembagaan organisasi dengan sikap politiknya terhadap isu nasional termasuk dalam hal ini adalah UU IKN 2022.

Yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya yaitu peneliti menggunakan teori Kelembagaan, Elite Massa, dan Sikap Politik dibalut dengan metode penelitian campuran (mixed methods) kualitatif dan kuantitatif. Adapun Pemilihan metode terkait dengan kebutuhan penelitian, yakni karakteristik data yang ada di lapangan

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan campuran (mixed) antara kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan metode campuran ini digunakan dengan alasan untuk lebih memahami masalah penelitian dengan mengonvergensi (atau mentriangulasi) data kuantitatif yang berupa

angka-angka dan data kualitatif yang berupa rincian-rincian deskriptif.

Hasil dan pembahasan

Mahasiswa merupakan seseorang yang sering disebut sebagai kaum intelektual maupun kaum pergerakan yang mana kerap kali dipundaknya terdapat aspirasi ataupun suara-suara rakyat. Menjalani perannya sebagai kaum intelektual, mahasiswa kerap kali dituntut untuk peka serta kritis terhadap keadaan negara Indonesia dan segala kebijakan didalamnya, maka dari itu mahasiswa perlu untuk mempunyai pertimbangan dan wawasan yang luas untuk menyikapi segala kebijakan ataupun keadaan yang ada di negara Indonesia.

Dalam hal ini kebijakan yang menjadi subjek penelitian ialah kebijakan terkait pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, yang mana dalam kebijakan pemindahan ibukota negara ini mahasiswa juga dituntut untuk setidaknya menyikapi kebijakan pemindahan ibukota negara ini. Karena pemindahan ibukota negara ini bukan tidak mungkin akan berpengaruh terhadap berbagai aspek kenegaraan yang ada di Indonesia seperti politik, ekonomi dan kemasyarakatan.

Pada penelitian kali ini peneliti memilih objek penelitian untuk menyikapi kebijakan pemindahan ibukota negara dari kalangan para elite mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta yaitu para ketua BEM fakultas yang mana para ketua BEM fakultas sebagai elite politik kampus dianggap merepresentasikan sikap mahasiswa dari masing-masing fakultasnya.

Menyikapi kebijakan pemindahan ibukota negara para ketua BEM fakultas di Universitas Negeri Jakarta diberikan kuisioner serta diwawancarai oleh peneliti. Dari hasil kuisioner tersebut serta wawancara yang telah dilakukan, didapati hasil bahwa 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) dari kalangan ketua BEM fakultas yang ada di Universitas Negeri Jakarta atau sejumlah 6 orang dari 8 orang ketua BEM fakultas yang ada di Universitas Negeri Jakarta setuju dengan kebijakan pemindahan ibukota negara yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Dengan data tersebut, bisa dikatakan sebagian besar dari para mahasiswa UNJ setuju akan kebijakan pemindahan ibukota negara yang mana sikap tersebut diwakili oleh para ketua BEM sebagai elite politik kampus. Sikap tersebut diambil setelah mendengar serta melihat penjelasan terkait pemindahan ibukota negara serta urgensinya sehingga menurut para ketua BEM

fakultas di UNJ pemindahan ibukota negara ini dirasa perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena DKI Jakarta sudah terlalu padat.

Para ketua BEM fakultas yang ada di UNJ memberikan kritik terhadap pendanaan kebijakan pemindahan ibukota negara ini yang mana menurut para ketua BEM fakultas pendanaan pemindahan ibukota negara ini belum jelas alokasi serta sumbernya darimana, dalam arti pendanaan terkait kebijakan pemindahan ibukota ini belum jelas serta belum direncanakan dengan baik, para ketua BEM fakultas memberikan saran agar perencanaan serta alokasi dana untuk kebijakan pemindahan ibukota negara ini diperjelas dan direncanakan dengan baik.



Gambar.1 proses pengumpulan data

Sedangkan terkait UU IKN didapatkan hasil bahwa 60% dari para ketua BEM fakultas yang ada di UNJ atau sejumlah 5 orang dari 8 ketua BEM fakultas di UNJ setuju akan UU IKN tersebut, dan 3 lainnya tidak setuju dengan UU IKN. Akan tetapi walaupun ada perbedaan sikap dari para ketua BEM perihal UU IKN ini, para ketua BEM sama-sama menyoroti perihal demokrasi di IKN ini yang mana dalam UU IKN disebutkan bahwa tidak ada pilkada dan pemilihan DPRD yang mana seyogyanya hal tersebut menjadi komponen penting dalam hal demokrasi di daerah.

Alasan dari 5 orang ketua BEM yang menerima yaitu karena pemindahan ibukota Negara perlu adanya konstitusi yang jelas dan uu ikn dirasa menjadi konstitusi yang jelas dalam hal pemindahan ibukota Negara, akan tetapi menurut 5 orang ketua BEM perlu adanya penyempurnaan pada UU IKN. Selanjutnya, alasan dari 3 orang menolak mendukung UU IKN karena sedari awal penyusunan sudah tidak masuk akal karena disusun hanya dalam kurun waktu 42 hari terkesan ngebut dalam penyusunannya, selain itu isi dari UU IKN ini tidak merepresentasikan keterlibatan rakyat khususnya masyarakat daerah IKN Nusantara nantinya karena segala mayoritas kebijakan akan diatur oleh pemerintah pusat dan tidak adanya pemilihan kepala daerah dan DPRD.

Pada kesempatan kali ini juga pengamat politik yaitu kang Ujang Komarudin menyampaikan bahwa sikap yang diambil oleh para mahasiswa diwakili para ketua BEM fakultas menunjukkan adanya keinginan para mahasiswa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pemindahan ibukota negara yang baru, yang mana partisipasi tersebut ditunjukkan dengan adanya saran serta kritik dari para mahasiswa atau yang bisa dibilang catatan-catatan yang berhubungan dengan pemindahan ibukota negara yang dicanankan oleh pemerintah Indonesia.

Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 125–140.

Simpulan

Pada penelitian ini didapatkan data dan fakta bahwa 75 % dari para ketua BEM fakultas di Universitas Negeri Jakarta atau sebanyak 6 orang ketua BEM fakultas mendukung adanya pemindahan ibukota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dengan alasan karena DKI Jakarta sudah terlalu padat dan Indonesia terlalu berpusat di DKI Jakarta saja. Selain itu didapatkan data bahwa 60 % atau 5 orang dari ketua BEM fakultas menerima dan mendukung adanya UU IKN karena dirasa pemindahan ibukota Negara perlu adanya konstitusi yang jelas mengatur terkait pemindahan ibukota Negara dan UU IKN sudah menjadi konstitusi yang jelas. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa UNJ mendukung pemindahan ibukota dengan memberikan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan ibukota Negara yang baru nantinya. Dengan adanya sikap yang dikeluarkan oleh para mahasiswa, menandakan bahwa adanya keinginan para mahasiswa untuk terlibat dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan rakyat.

Referensi

- Anshoriy, N. (2008). *Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan*. LKis.
- Kariem, M. Q., & Hartomi, D. (2019). Sikap Politik DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Wacana Suksesi Kepemimpinan di Kraton Yogyakarta. *Journal of Government and Civil Society*, 03(02).
- Reza, A., & Shakib, S. (2019). Examining the Impact of Using Social Networks on Political Knowledge and Political Attitude by Iranian University Students.